

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan penduduk yang padat dan sangat menjunjung nilai demokrasi. Konsep dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sangat diutamakan di negara kita ini. Hal itu kadang menjadi tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin dalam menarik masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tentunya untuk kebaikan masyarakat, tidak terlepas dari upaya dalam meningkatkan citra dan kualitas pemerintahan, yakni dengan menerapkan prinsip *good governance*.

Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*.

Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *good governance* di Indonesia: Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh *stakeholders*, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance* melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada

pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Dalam pemberian pelayanan publik, disamping permasalahan diatas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga Negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karna budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan. Menurut Dunn (dalam Falih Suardi, 2010, hlm. 65) mengemukakan bahwa:

Aparat birokrasi seringkali tidak mampu menemukan problem-problem khusus dalam masyarakat dengan baik karena kapasitas mereka terbatas, dan seringkali mereka terjebak ke dalam gejala masalah yang sebenarnya, sehingga kesalahan dalam mengidentifikasi masalah akan berakibat juga salahnya keputusan yang diambil.

Karena keterbatasan yang dimiliki tersebut, mengakibatkan kecenderungan dan keputusannya kearah penyeragaman dan mengabaikan pluralitas, sehingga menyebabkan banyak kebijakan dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kurang dapat memenuhi aspirasi rakyat banyak.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep *public service* (pelayanan publik) tentu memang sangat diperlukan, salah satunya pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan terobosan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 untuk mempermudah pelayanan terhadap anak-anak yang usianya masih dibawah 17 tahun atau belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). KIA bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, dan kartu pintar atas nama sendiri. Selain itu, KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik pada anak, serta mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional pada anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. KIA diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan

kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli, serta perlu melampirkan kartu keluarga dan KTP asli orang tua. Sedangkan untuk yang berusia 5-17, tetapi belum memiliki KIA persyaratannya ditambah dengan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar. Pemerintah menetapkan bahwa pembuatan Kartu Identitas Anak gratis tanpa dipungut biaya. Kartu Identitas Anak baru diberlakukan di beberapa kabupaten dan kota,

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran atau memiliki kartu pelajar. Dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi pada anak, baik itu pencarian anak hilang, identifikasi korban kecelakaan, atau maraknya kasus perdagangan anak. Selama ini untuk anak yang sudah sekolah identitasnya berupa kartu pelajar, namun bagi anak yang belum sekolah identitasnya hanyalah berupa akte kelahiran yang riskan untuk dibawa-bawa. KIA ini konsepnya sama, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memberikan identitas serta tercatat dalam kependudukan masing-masing. KIA sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki E-KTP. KIA merupakan perwujudan kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayan publik, khususnya bagi anak.

Pelayanan pemerintah terhadap pembuatan KIA tentunya akan sangat berhubungan dengan kepuasan masyarakat. partisipasi, daya tanggap, maupun transparansi akan sangat diperlukan. Kepuasan masyarakat menjadi modal utama dalam keberhasilan suatu kebijakan. Pada dasarnya kepuasan akan menimbulkan kepercayaan, dan kepercayaan akan tumbuh menjadi kepedulian. Kepedulian itulah yang sangat diperlukan oleh pemerintah untuk keberlangsungan suatu kebijakan. Masyarakat yang peduli artinya akan mendukung dan berpartisipasi penuh terhadap pemerintah.

Melihat hal tersebut tentunya penerapan prinsip *good governance* akan sangat diperlukan untuk menarik simpati dan membuat pelayanan publik lebih maksimal untuk masyarakat.

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik terkait pembuatan Kartu Identitas anak. Kartu Identitas Anak atau disingkat KIA ini merupakan program pemerintah pusat

dalam meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya bagi anak berusia di bawah 17 tahun. Program ini diwujudkan dalam bentuk PERMENDAGRI nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Meski baru berjalan kurang dari dua tahun, program ini dinilai berjalan dengan baik. Namun disamping itu banyak kendala terjadi sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (Studi Deskriptif di Disdukcapil Kota Cimahi)**”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang mengenai permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis merumuskannya dalam rumusan masalah agar terarah serta sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah disinggung dalam latar belakang penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak jika dilihat dengan penerapan prinsip *Good Governance*?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip *Good Governance* untuk pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip *Good Governance* untuk pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan pada penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai “Efektivitas Penerapan prinsip *Good Governance* dalam Rangka Penyelenggaraan Permendagri No. 2 Tahun 2016 di Kota Cimahi”

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus yakni:

- a. Untuk mengidentifikasi bagaimana realisasi penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- b. Untuk menganalisis bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak jika dilihat dengan penerapan prinsip *Good Governance*
- c. Untuk mengidentifikasi Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip *Good Governance* untuk pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- d. Untuk menganalisis bagaimana Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dalam penerapan prinsip *Good Governance* untuk pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik bagi diri pribadi maupun bagi khalayak. Adapaun beberapa manfaat yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat/Signifikansi dari segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi baik itu berupa data, fakta, dan analisis sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan. Penelitian ini diharapkan memberikan andil terhadap keilmuwan PKn terutama bagi mata kuliah Kebijakan Publik,

Ucu Puspita, 2018

**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PERMENDAGRI  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sistem Pemerintahan Daerah, Pendidikan Nilai dan Moral, Hukum Adat serta materi-materi lainnya terkait kajian pelayanan, sistem pemerintahan daerah tingkat kabupaten, kebijakan publik dan pendidikan berkarakter bagi peserta didik.

#### **1.4.2 Manfaat/Signifikansi dari segi Kebijakan**

Dengan adanya penelitian tentang Kartu Identitas Anak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 di Kota Cimahi ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada pemerintah ataupun warga masyarakat tentang pentingnya pembuatan identitas kependudukan terhadap anak-anak. Melalui penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dan bisa berpartisipasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

#### **1.4.3 Manfaat/Signifikansi dari segi Praktis**

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

- a. Bagi pemerintah untuk memberikan informasi tentang pentingnya pembuatan Kartu Identitas Anak dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Bagi mahasiswa/mahasiswi departemen Pendidikan Kewarganegaraan akan dijadikan salah satu referensi dalam memahami pentingnya pelayanan publik untuk menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.
- c. Bagi masyarakat akan memberikan informasi dan wawasan tentang pembuatan Kartu Identitas Anak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah melalui PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

#### **1.4.4 Manfaat/signifikansi dari segi Isu atau Aksi Sosial**

Manfaat yang diharapkan dari segi isu atau aksi sosial yakni dengan diterapkannya prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dapat meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, sehingga akan timbul kepuasan dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Hal itu akan sangat mempengaruhi terhadap meningkatnya jalinan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Ucu Puspita, 2018

**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PERMENDAGRI  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi memuat sistematika penulisan skripsi sesuai Bab, urutan, dan hubungan atau keterkaitan antara Bab I hingga Bab V. Sistematika skripsi memuat penjelasan singkat mengenai isi dalam setiap Bab pada skripsi ini. Adapun sistematika skripsi mengenai “Efektivitas Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Rangka Penyelenggaraan Permendagri No. 2 Tahun 2016 di Kota Cimahi (Studi Deskriptif Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak)” terdiri dari lima BAB sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian serta sistematika organisasi skripsi.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas dan menguraikan kajian pustaka yang berisi tentang teori dan materi yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji serta bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta teoritis maupun konseptual terhadap penelitian yang diteliti. Adapun kajian pustaka yang digunakan yaitu teori prinsip *good governance*, teori kebijakan publik, serta teori kepuasan masyarakat.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas cara-cara dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian, dimulai dengan pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, pengujian keabsahan data dan prosedur pelaksanaan penelitian.

### BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian, temuan di lapangan berdasarkan teknik pengumpulan data melalui deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan deskripsi temuan di lapangan yang dikaitkan dengan teori dan konsep.

## BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan membahas hasil temuan dari analisis dan penafsiran dari hasil temuan di lapangan berdasarkan deskripsi pada Bab IV serta implikasi dan rekomendasi yang dirancang untuk mengetahui dampak maupun pengaruh pemerintah, kepuasan masyarakat Cimahi, dan penelitian selanjutnya serta memberikan masukan dan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat semua sumber yang digunakan dan dikutip oleh peneliti dalam penulisan skripsi. Keseluruhan sumber ditulis berdasarkan nama penulis, tahun, judul, dan penerbit yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam penelitian.